

DPRD dan Pemkab Busel Bahas APBD Perubahan 2026 dengan Belanja Rp576,9 Miliar



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- DPRD Kabupaten Buton Selatan mulai membahas Ranperda Perubahan APBD 2026 dengan postur belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp576,948 miliar. Di sisi lain, pendapatan daerah dalam rancangan tersebut ditetapkan sebesar Rp533,433 miliar, dengan pembiayaan menjadi salah satu komponen penutup struktur anggaran.

Pembahasan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Busel sebagai bagian dari tahapan penyusunan perubahan APBD bersama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Proses tersebut

diperlukan agar kebijakan anggaran dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Harwanto, yang mewakili Bupati Buton Selatan, mengatakan perubahan APBD diarahkan untuk memastikan sumber daya keuangan daerah tetap mendukung target pembangunan. Penyesuaian dilakukan pada sisi pendapatan dan belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Perubahan APBD

Lanjut ke Hal: 7

MIN 1 Baubau Tanamkan Keteladanan Rasulullah Lewat 500 Kali Salawat

Sekitar 1.000 Siswa Ikuti Maulid Nabi

500 Kali Salawat Dilantunkan

Pembentukan Karakter dan Akhlak Mulia

Tema: Meneladani Akhlak Rasulullah SAW

Maulid Nabi Digelar untuk Kelima kalinya

Zikir, Salawat, Al-Qur'an dan Makan Bersama

Laporan: Firman,
Baubau
Post-Durasitimes

BAUBAU, BP -Sekitar 1.000 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Baubau melantunkan salawat Nabi sebanyak 500 kali dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman madrasah, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi peringatan keagamaan, tetapi diarahkan sebagai bagian dari pendidikan karakter untuk membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Kepala MIN 1 Baubau Dra. Yuliana Donggi Hanas, M.Pd., mengatakan Maulid Nabi merupakan agenda tahunan yang tahun ini telah memasuki pelaksanaan kelima. Ia menyebut keterlibatan orang tua dan wali murid menjadi salah satu unsur penting dalam kelancaran kegiatan yang mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Kita Wujudkan Generasi Madrasah yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak Mulia.”

Lanjut ke Hal: 7

Terima Kunjungan Manajemen PLN Sulselrabar, Bupati Azhari Dorong Sinergikan Pembangunan Infrastruktur Listrik Merata Hingga ke Desa



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendorong PT PLN (Persero) mempercepat pemerataan sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah pesisir dan kepulauan. Infrastruktur energi

Lanjut ke Hal: 7

CX126 Jadi Strategi BPJS Kesehatan Meratakan Standar Pelayanan JKN Nasional

Laporan: Firman

SURABAYA, BP - Pengalaman peserta kini menjadi salah satu tolok ukur penting BPJS Kesehatan dalam memperbaiki kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui program Customer eXcellence 126 (CX126), BPJS Kesehatan mengevaluasi penerapan standar pelayanan di 126 Kantor Cabang sekaligus memetakan



praktik terbaik yang dapat diterapkan secara nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito,

mengatakan pelayanan publik tidak lagi cukup hanya tersedia, tetapi harus diberikan kepastian informasi dan pengalaman

yang konsisten kepada masyarakat. Karena itu, kebutuhan peserta harus menjadi pijakan

Lanjut ke Hal: 7

APBD Perubahan Baubau 2026 Disepakati Antar Banggar DPRD dan Pemkot, Pajak Daerah Ditarget Rp52,479 Miliar



Laporan: Firman

BAUBAU, BP -Target penerimaan pajak daerah Kota Baubau dalam Perubahan APBD 2026 naik sekitar Rp1,029 miliar setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kesepakatan itu dicapai dalam

pembahasan di DPRD Kota Baubau, Senin (7/9/2026).

Kenaikan target pajak tersebut membuat proyeksi penerimaan berubah dari Rp51,450 miliar menjadi Rp52,479 miliar atau meningkat sekitar dua persen. Selain pajak, Banggar meminta pemerintah mengoptimalkan sejumlah retribusi daerah, antara lain pelayanan persampahan, tempat rekreasi dan olahraga, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),

pelayanan pelabuhan, serta jasa parkir.

Juru Bicara Banggar DPRD Kota Baubau, La Ode Abdul Tamim, SH., MH., mengatakan optimalisasi pendapatan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Menurut dia, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terlibat dalam memperkuat basis penerimaan daerah, termasuk dengan membenahi data

Lanjut ke Hal: 7

DPR Desak BGN Tanggung Biaya Siswi Karo yang Alami Gangguan Ingatan



Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa meminta pemerintah merespons serius kasus siswa keracunan hingga alami gangguan ingatan karena Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- DPR RI meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan pengobatan Febiona Purba (16), siswi SMK Bersama Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang mengalami gangguan ingatan setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) diminta mengambil tanggung jawab terhadap pembiayaan pemulihan kesehatan korban.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa setelah mengetahui kondisi Febiona yang masih menjalani pemeriksaan medis di RSUP H Adam Malik Medan. Menurut Saan, munculnya gangguan ingatan dan kesulitan berbicara setelah dugaan keracunan merupakan persoalan serius yang tidak dapat ditangani secara biasa.

“Jadi sekali lagi, kami meminta agar ditangani secara serius karena ini sudah pada level yang cukup memprihatinkan,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9).

Febiona diketahui mengonsumsi MBG di sekolahnya pada 13 Agustus. Setelah itu, ia mengalami gejala keracunan dan selama lebih dari tiga pekan berpindah-pindah rumah sakit untuk memperoleh perawatan. Kondisinya kemudian dilaporkan memburuk dengan munculnya gangguan ingatan hingga kesulitan berbicara.

Saat ini Febiona

menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUP H Adam Malik Medan. Humas rumah sakit, Rosario Dorothy Simanjuntak, mengatakan Febiona telah tiga kali datang untuk menjalani pengobatan rawat jalan. Namun, tim medis belum dapat memastikan diagnosis maupun penyebab gangguan yang dialaminya karena pemeriksaan masih berlangsung.

“Saat ini dokter yang menangani masih belum bisa memberikan keterangan karena proses pemeriksaan masih berjalan,” ujar Rosario.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara Hamid Rijal Lubis mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari RSUP H Adam Malik mengenai kondisi terbaru Febiona, termasuk informasi mengenai gangguan ingatan yang dialaminya. Karena itu, Dinkes Sumut memilih menunggu hasil pemeriksaan medis sebelum menarik kesimpulan mengenai penyebab kondisi tersebut.

“Nanti kita cek dulu ke tim medis Rumah Sakit Adam Malik. Sampai sejauh ini belum ada secara resmi, tertulis disampaikan kepada kami tentang isu yang disebutkan itu,” kata Hamid.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mengatakan kondisi Febiona masih dalam pemantauan tim medis. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah gangguan yang dialami berkaitan dengan sistem saraf atau faktor medis lainnya.

Pemerintah daerah, kata Bobby, masih menunggu hasil pemeriksaan sebelum memastikan hubungan antara kondisi tersebut dan dugaan keracunan.

“Perlu kita lihat apakah tindak lanjut dari medisnya, pemeriksaan dari medisnya, apakah memang pengaruh dari otonomnya atau sarafnya atau yang lainnya,” ujar Bobby.

Saan menilai aspek pembiayaan tidak boleh menjadi persoalan bagi keluarga korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan berlangsung. Ia meminta BGN dan pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan medis Febiona, terutama apabila nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kaitan dengan konsumsi MBG.

“Karena itu, terkait dengan pembiayaan untuk pemulihan kesehatan anak tersebut juga perlu diperhatikan dan perlu untuk ditanggung secara sungguh-sungguh,” kata Saan.

Kasus Febiona muncul ketika program MBG telah berkembang menjadi salah satu program pemerintah berskala nasional. MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 melalui 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik, sekaligus menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan

balita.

Dalam perkembangannya, BGN mencatat jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 55,1 juta orang pada awal 2026, dengan 19.188 SPPG beroperasi di 38 provinsi. Skala program yang besar membuat aspek keamanan pangan, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga pemeriksaan makanan, menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.

Persoalan keamanan pangan dalam program makan sekolah bukan hanya terjadi di Indonesia. Secara internasional, tragedi makan siang sekolah di Bihar, India, pada 2013 menjadi salah satu contoh paling serius ketika makanan sekolah yang terkontaminasi menyebabkan puluhan siswa meninggal dan banyak lainnya jatuh sakit. Kasus tersebut kemudian mendorong penguatan pengawasan terhadap keamanan makanan sekolah di wilayah tersebut.

Karena itu, kasus Febiona tidak hanya menyangkut penanganan seorang siswa, tetapi juga menjadi ujian terhadap mekanisme pengawasan keamanan pangan dalam program berskala nasional. Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan Febiona masih menunggu hasil pemeriksaan medis sehingga hubungan langsung antara kondisi tersebut dan MBG belum dapat dinyatakan secara definitif. (*)

Inpres Prabowo Perketat Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar



Presiden Prabowo Subianto terbitkan Inpres No. 11/2026 untuk larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Presiden RI Prabowo Subianto memperketat penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Inpres yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026 itu menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, hingga kepala daerah untuk menegakkan larangan pembukaan lahan dengan membakar serta kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga diperintahkan memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan, menyuruh, memfasilitasi, maupun membiarkan terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif.

Dalam aturan tersebut, pemerintah turut memperketat ruang pengecualian pembukaan lahan dengan metode kearifan lokal. Pengecualian hanya dapat diterapkan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan terpenuhi secara kumulatif.

Salah satu ketentuannya membatasi luas lahan yang dapat dibuka maksimal dua hektare per kepala keluarga. Pelaksanaan juga wajib dilengkapi sekat bakar yang dipelihara secara ketat serta dilarang dilakukan di ekosistem gambut dan zona

penyangga dengan radius 500 meter.

Pengecualian tersebut juga tidak berlaku untuk pembukaan lahan bagi kepentingan korporasi, perkebunan komersial, pertambangan, maupun pemegang izin atau hak konsesi. Pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat dan tidak berlaku sepanjang waktu.

Ketentuan kearifan lokal baru dapat diberlakukan setelah status darurat Karhutla di suatu daerah dicabut oleh kepala daerah. Artinya, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan ketika wilayah masih berada dalam status darurat Karhutla.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemerintah saat ini menangguk penerapan pembakaran hutan dan lahan berbasis kearifan lokal. Kebijakan itu diambil karena Indonesia menghadapi musim kemarau panjang yang ekstrem akibat fenomena El Nino.

Menurut Listyo, aparat bersama TNI juga turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pembukaan lahan. Hingga kini, terdapat 200 laporan polisi terkait Karhutla yang sedang diproses, dengan 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari jumlah tersangka tersebut, 119 orang diduga sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan, sedangkan 18 orang lainnya terbukti lalai hingga menyebabkan kebakaran. Selain itu, terdapat delapan perusahaan yang sedang diproses terkait kasus Karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra. (*)

Pemkot Kendari Perkuat Tracing TBC untuk Percepat Temuan Kasus di Alolama



Laporan: Lisna

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari memperkuat upaya menemukan kasus Tuberkulosis (TBC) sedini mungkin melalui tracing TBC terintegrasi yang disertai layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonaga, Senin (7/9/2026). Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan pasien sekaligus memutus mata rantai penularan di masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, STP., S.H., M.Si., yang menghadiri kegiatan di Kantor Kelurahan Alolama, mengatakan penemuan kasus secara cepat menjadi bagian penting dalam pengendalian TBC. Menurut dia, masyarakat yang terindikasi mengalami gejala perlu segera memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai standar kesehatan.

“Semakin cepat kasus ditemukan, semakin cepat pula dilakukan penanganan. Ini penting untuk membantu proses penyem-

buhan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain,” kata Amir Hasan.

Ia meminta masyarakat tidak menghindari pemeriksaan kesehatan karena khawatir terhadap hasil diagnosis. Justru, kata dia, pemeriksaan sejak awal memungkinkan gangguan kesehatan diketahui lebih cepat dan ditangani secara terarah.

Pelaksanaan tracing juga diharapkan menghasilkan data dan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Kota Kendari. Data tersebut penting bagi petugas kesehatan untuk menentukan langkah penanganan serta pencegahan yang sesuai.

Selain penelusuran TBC, warga mendapat akses pemeriksaan kesehatan gratis. Amir menilai layanan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Penanggulangan TBC tidak dapat

dilakukan hanya oleh pemerintah atau tenaga kesehatan. Dibutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya.

Amir mengapresiasi asistensi tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Kendari, lanjutnya, akan terus mendorong pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, dengan perhatian tidak hanya pada pengobatan, tetapi juga pencegahan.

Masyarakat juga diingatkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta segera memanfaatkan fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penularan penyakit sekaligus menjaga produktivitas masyarakat.

Secara historis, pengendalian TBC di Indonesia telah berkembang panjang. WHO mencatat Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis mulai dibentuk pada 1994, sedangkan strategi DOTS telah

diadopsi Indonesia sebagai strategi pengendalian nasional sejak 1995. Sebelumnya, program pengendalian TBC nasional telah dirintis sejak 1969.

Di tingkat global, TBC pernah dinyatakan WHO sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat dunia pada 1993. Respons internasional kemudian diperkuat melalui strategi DOTS dan berbagai pendekatan pengendalian lainnya. WHO pada 2026 masih menilai TBC sebagai tantangan kesehatan serius bagi Indonesia dan menekankan pentingnya penemuan kasus secara dini serta keberlanjutan pengobatan.

Dengan tracing terintegrasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di tingkat kelurahan, Pemkot Kendari berharap masyarakat semakin aktif memeriksakan kondisi kesehatannya. Upaya tersebut diharapkan mempercepat penemuan kasus, mempercepat pengobatan, dan menekan risiko penyebaran TBC di lingkungan masyarakat. (*)

Kendari Perkuat Pengawasan Perumahan Lewat Permen PKP Nomor 18 Tahun 2025



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari memperkuat tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan menyamakan pemahaman mengenai standar usaha, kewajiban pelaku usaha, mekanisme pengawasan, hingga sanksi administratif. Langkah itu dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 18 Tahun 2025 di Kota Kendari, Senin (7/9/2026).

Sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari itu dipimpin Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari Satria Damayanti. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan regulasi baru dipahami secara seragam oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan.

Permen PKP Nomor 18 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha, pelaksanaan pengawasan, dan penerapan sanksi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perumahan. Regulasi ini ditetapkan pada 31 Desember 2025 sebagai aturan pelaksana setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Satria mengatakan kesamaan pemahaman terhadap regulasi diperlukan agar pelaksanaan pemba-

ngunan tidak berhenti pada penyediaan rumah, tetapi juga memenuhi aspek penataan kawasan, kelayakan, keberlanjutan, serta kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian, tetapi juga harus memperhatikan aspek penataan kawasan, kelayakan, keberlanjutan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat,” jelas Satria.

Materi yang disampaikan mencakup kewajiban pelaku usaha dan pemerintah daerah serta pengawasan yang dilakukan secara rutin maupun insidental secara berjenjang. Ketentuan tersebut juga menempatkan kepatuhan sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan usaha sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkualitas,” kata Satria. Menurut dia, penerapan ketentuan secara konsisten diharapkan membuat program dan kegiatan bidang perumahan berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.

Secara nasional, kebijakan perizinan berbasis risiko bukan hal yang sepenuhnya baru. Pemerintah sebelumnya menerapkan melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi perizinan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, PP tersebut kemudian dicabut

dan digantikan PP Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku sejak 5 Juni 2025.

Permen PKP Nomor 18 Tahun 2025 menjadi bagian dari penyesuaian regulasi sektor perumahan terhadap kerangka baru tersebut. Pada Juli 2026, Kementerian PKP juga menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan petunjuk teknis mengenai pemenuhan kewajiban pelaku usaha dan tata cara penerapan sanksi administratif.

Dalam konteks global, penataan perumahan telah lama ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia dan perkotaan. Konferensi Habitat I Perserikatan Bangsa-Bangsa di Vancouver pada 1976 menjadi salah satu tonggak penting, sedangkan Habitat II di Istanbul pada 1996 menegaskan kembali tujuan penyediaan hunian layak bagi semua dan pembangunan permukiman yang aman, sehat, layak huni, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Karena itu, sosialisasi di Kendari tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan perumahan berlangsung dengan standar yang jelas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan pembahasan dan penyamaan persepsi mengenai penerapan regulasi dalam pelaksanaan tugas di daerah. (*)

Jaelani Kawal Aspirasi Nelayan Buton Tengah, Azhari Dorong Bantuan Tepat Sasaran



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Penguatan ekonomi masyarakat pesisir menjadi perhatian dalam penyerahan bantuan aspirasi bidang perikanan dan kelautan kepada nelayan di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Laku-do, Kabupaten Buton Tengah, Jumat (4/9/2026). Bantuan tersebut diserahkan Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Jaelani, dalam rangkaian Serah Terima Bantuan Aspirasi dan Serap Aspirasi “Bang Jay Bersama Masyarakat”.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Perikanan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas penangkapan ikan dan penghidupan masyarakat pesisir.

Jaelani mengatakan bantuan yang diserahkan merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan nelayan melalui jalur aspirasi. Ia meminta masyarakat bersama Dinas Perikanan Kabupaten

Buton Tengah tidak berhenti pada penerimaan bantuan, tetapi menyiapkan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh sebagai dasar pengajuan program berikutnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Setiap kebutuhan yang diajukan, seperti alat tangkap, mesin tempel, dan sarana pendukung lainnya, akan kami proses sesuai mekanisme KKP,” kata Jaelani.

Menurut dia, usulan yang disampaikan secara terstruktur akan memudahkan proses pengusulan sekaligus memastikan program pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nelayan di lapangan. Jaelani juga membuka ruang partisipasi masyarakat agar nelayan terlibat langsung dalam menentukan prioritas bantuan.

Bupati Azhari menilai dukungan pemerintah pusat melalui aspirasi DPR RI merupakan bagian penting dalam memperkuat sektor perikanan Buton Tengah. Ia menyebut sektor tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

“Kolaborasi lintas lembaga harus terus diperkuat

agar aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan,” ujar Azhari.

Azhari juga mengatakan kelompok penerima agar menggunakan bantuan secara bertanggung jawab. Menurut dia, bantuan tidak semata-mata harus dilihat sebagai fasilitas jangka pendek, tetapi sebagai modal untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat kemandirian ekonomi nelayan.

Pola penguatan kapasitas nelayan melalui bantuan sarana produksi tersebut memiliki konteks lebih luas dalam sejarah pembangunan perikanan Indonesia. Pemerintah mulai menempatkan urusan kelautan dan perikanan dalam kelembagaan khusus pada 1999 melalui pembentukan Departemen Eksplorasi Laut, yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan pada tahun yang sama.

Di tingkat global, pengelolaan perikanan juga mengalami perubahan penting. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengadopsi Code of Con-

duct for Responsible Fisheries pada 31 Oktober 1995. Pedoman tersebut menekankan konservasi, pengelolaan sumber daya perikanan, perlindungan ekosistem, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Kerangka global tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. FAO juga menempatkan nelayan dan pemerintah sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan untuk generasi berikutnya.

Bagi Buton Tengah, sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, Dinas Perikanan, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bantuan benar-benar menjawab kebutuhan nelayan. Jaelani menegaskan keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut, sementara pemerintah daerah diharapkan membantu menyusun kebutuhan secara terukur agar program yang diajukan kepada KKP dapat memberikan manfaat berkelanjutan. (*)

Wabup Rahman Dampingi KSP RI Tinjau Paskibraka di SMAN 1 Kulisusu



Laporan: Firman

BURANGA, BP- Tim Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI) melakukan verifikasi lapangan terhadap program Paskibraka dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di SMAN 1 Kulisusu serta isu strategis pertahanan nasional di Kodim 1429 Buton Utara, Jumat (28/8/2026). Kunjungan tersebut didampingi Wakil Bupati Buton Utara Rahman, SKM., M.Kes., sebagai bagian dari pemantauan langsung program dan kondisi daerah.

Verifikasi di SMAN 1 Kulisusu mendapat perhatian khusus setelah sekolah tersebut berhasil membina peserta didik hingga mencapai tingkat nasional. Tim KSP RI menilai capaian tersebut menjadi indikator positif dalam pembinaan generasi muda, terutama dalam penguatan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila.

Mayjen (Purn) Dr. Benny Octaviar mengapresiasi keberhasilan sekolah tersebut sekaligus menyatakan prestasi para pelajar akan disampaikan kepada Kepala Staf Presiden untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

“Kami mengucapkan selamat dan salut kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berhasil membina anak-anak hingga mencapai tingkat nasional. Prestasi ini akan kami laporkan kepada Kepala Staf Presiden agar menjadi perhatian,” kata Benny.

Selain mengevaluasi program Paskibraka dan PIP, rombongan melihat kondisi sarana pendidikan di SMAN 1 Kulisusu. Benny mengatakan kebutuhan sekolah akan dipayakan masuk dalam pertimbangan program revitalisasi, meskipun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Memang tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Namun, kita akan terus berusaha agar apa yang telah disampaikan dapat dimasukkan dalam prioritas program revitalisasi sekolah,” ujarnya.

Persoalan keterbatasan anggaran, menurut Benny, tidak hanya ditemukan pada sektor pendidikan. Berdasarkan hasil kunjungan selama dua malam di Buton Utara, keterbatasan fiskal juga terlihat pada sektor kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), ser-

ta pembangunan infrastruktur jalan.

“Persoalan yang dihadapi bukan hanya sekolah, tetapi hampir semua sektor. Rumah sakit, PUPR, infrastruktur jalan, dan sektor lainnya juga memiliki keterbatasan anggaran,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan penghitungan secara cermat dalam menetapkan prioritas pembangunan. Verifikasi lapangan menjadi penting agar kebutuhan daerah dapat dipetakan berdasarkan kondisi riil sekaligus diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat.

Secara kelembagaan, KSP merupakan lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. KSP memiliki tugas mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik kepresidenan, serta pengelolaan isu strategis. Kelembagaan KSP kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.

Sementara itu, penguatan pembinaan ideologi Pancasila memiliki perjalanan kelembagaan tersendiri. Pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017 untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pada 2020, Presiden melantik Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menandai penguatan kelembagaan pembinaan ideologi tersebut.

Agenda kunjungan Tim KSP RI di Buton Utara diawali dengan foto bersama di Rumah Jabatan Bupati, kemudian mengunjungi Kantor Bupati dan Keraton Kulisusu. Rangkaian kegiatan ditutup dengan verifikasi di Kodim 1429 Buton Utara terkait isu strategis pertahanan nasional. Turut mendampingi Sekda Buton Utara Muh. Hardhy Muslim, S.H., M.Si., Dandim 1429 Buton Utara, staf ahli bupati, asisten Setda, kepala OPD, Sekretaris DPRD, para kepala bagian Setda, serta Camat Kulisusu. (*)

Dinkes Busel Evaluasi RKO, Pastikan Ketersediaan Obat di Puskesmas



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton Selatan (Busel) memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan obat di seluruh Puskesmas melalui pembinaan pelaporan dan evaluasi kepatuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO).

Dr. La Ode Achmad mengatakan, evaluasi RKO tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan obat masyarakat dapat terpenuhi secara tepat. “Evaluasi RKO ini bukan sekadar administrasi, melainkan upaya memastikan setiap warga Buton Selatan mendapatkan pelayanan yang layak dan obat yang dibutuhkan,” tutur Achmad saat memberikan sambutan disalah satu gedung di Busel, (8/9/2026).

Achmad menambahkan, ketersediaan obat yang lengkap tepat waktu dan terjangkau menjadi salah satu indikator penting da-

lam menunjang kualitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama.

“Obat dan alat kesehatan adalah jantungnya pelayanan kesehatan. Jika obat tidak tersedia atau pelaporan kebutuhan tidak akurat, maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat,” kata dr. La Ode Achmad.

Dijelaskan pula, Dinkes Busel melakukan peninjauan terhadap kelengkapan laporan pemakaian dan stok obat di masing-masing Puskesmas. Evaluasi juga mencakup kesesuaian antara RKO dengan realisasi kebutuhan di lapangan, ketepatan waktu pelaporan, serta analisis terhadap kekosongan dan obat kedaluwarsa.

“Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan obat pada periode berikutnya. Langkah itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan obat maupun penumpukan persediaan yang tidak diperlukan,” ungkapnya.

Ia juga meminta para penanggungjawab

obat di setiap Puskesmas meningkatkan kedisiplinan dalam pencatatan dan pelaporan. Pengelolaan persediaan obat, kata dia, harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan data yang akurat.

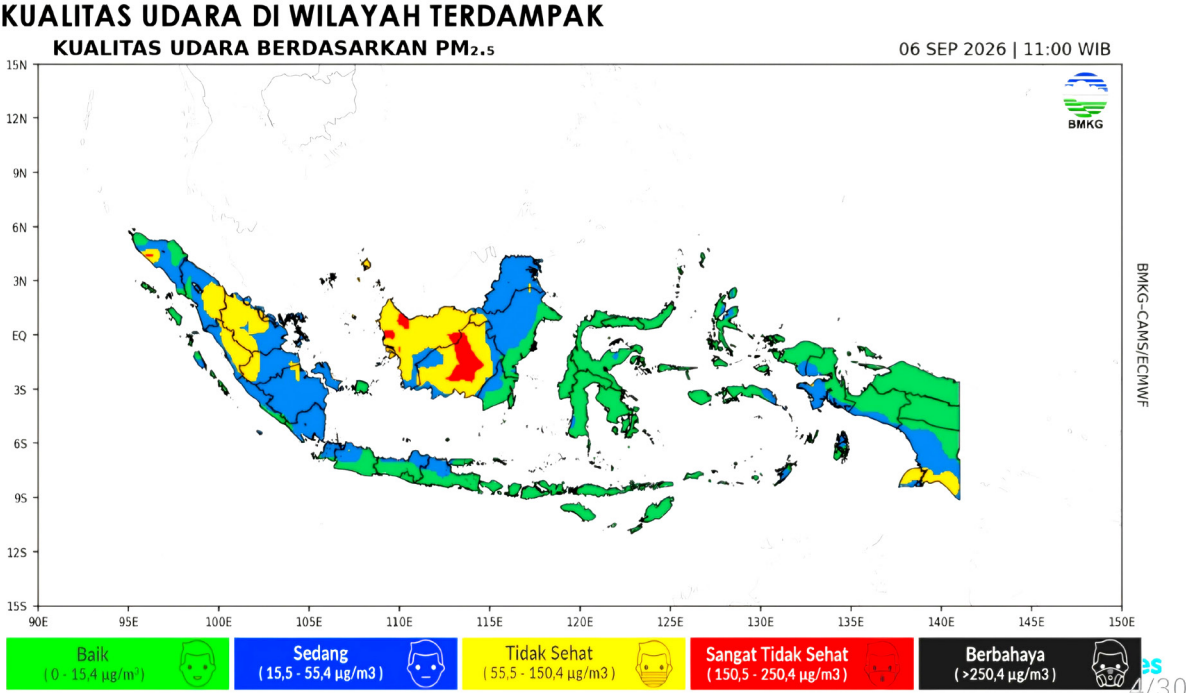
“Kepatuhan melaporkan data yang akurat adalah fondasi perencanaan yang baik. Dengan data yang benar, alokasi anggaran dan distribusi obat bisa lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Para Kepala Puskesmas (Kapus) berkomitmen meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan obat serta memastikan data RKO yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dinkes Busel juga berencana melakukan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan dan pelaporan obat di seluruh Puskesmas.

“Monitoring tersebut diharapkan dapat memastikan setiap temuan hasil evaluasi segera ditindaklanjuti sehingga ketersediaan obat bagi masyarakat tetap terjamin,” tutup Achmad.(*)

Kemenkes Siagakan 1.243 Fasilitas Kesehatan Hadapi Erupsi Anak Krakatau



JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan setelah erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB memicu sebaran abu vulkanik yang berdampak pada wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sekitar 23,36 juta jiwa berada di wilayah yang terdampak sebaran abu tersebut.

Untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan, Kemenkes menyiagakan 413 rumah sakit dan 830 puskesmas yang tersebar di 20 kabupaten/kota terdampak. Pemerintah juga menyiapkan pos pelayanan kesehatan, rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, ambulans, Public Safety Center (PSC) 119, serta Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK).

“Kami memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap siap menghadapi dampak erupsi, terutama gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Pemantauan dilakukan secara berkala dan kami meminta fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus gangguan pernapasan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Selain fasilitas pe-

layan kesehatan, pemerintah telah mengirimkan dukungan logistik ke daerah yang mengalami dampak paling parah. Bantuan tersebut mencakup lebih dari 100.000 masker N95 dan masker medis, ribuan kamata pelindung, obat-obatan, serta berbagai alat kesehatan.

Kewaspadaan terutama diarahkan terhadap gangguan pernapasan karena partikel abu vulkanik berukuran sangat kecil, termasuk PM_{2,5}, dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan memicu inflamasi serta gangguan kardipulmonal. Kemenkes mencatat kecenderungan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama di Banten, Lampung, dan Jawa Barat, meski belum terdapat pola peningkatan pneumonia yang seragam di seluruh wilayah terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan diminta mendapat perhatian lebih. “Abu vulkanik dapat mengiritasi

saluran pernapasan, mata, dan kulit. Karena itu, masyarakat perlu mengurangi paparan, terutama kelompok rentan,” ujar Aji.

Pemantauan kualitas udara juga dilakukan bersama lintas sektor. Data indeks standar pencemar udara (ISPU) pada 6 September 2026 pukul 12.16 WIB menunjukkan kualitas udara di sejumlah lokasi berada pada kategori sedang hingga tidak sehat, dengan PM_{2,5} menjadi salah satu parameter penting. Di Pelabuhan Bakauheni, seluruh titik pengukuran PM_{2,5} masih berada dalam batas aman, sedangkan PM₁₀ di seluruh titik telah melampaui baku mutu sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut.

Masyarakat diminta tetap berada di dalam ruangan saat abu vulkanik menyebar, menutup pintu dan jendela, serta menghindari kegiatan yang dapat membuat endapan abu kembali beterbangan. Jika harus keluar, warga dianjurkan menggunakan masker N95, KN95, KF94, FFP2, atau perlindungan setara, disertai goggles dan pakaian tertutup. Setelah beraktivitas di luar, tubuh dan pakaian perlu segera dibersihkan.

Pengalaman masa lalu menjadi alasan kewaspadaan tersebut tidak hanya diarah-

kan pada dampak kesehatan akibat abu, tetapi juga pada dinamika vulkanik Gunung Anak Krakatau. Letusan Krakatau pada 1883 tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah modern. Smithsonian Global Volcanism Program mencatat lebih dari 36.000 orang meninggal, sebagian besar akibat tsunami yang menerjang pesisir Jawa dan Sumatra. Anak Krakatau kemudian tumbuh di dalam kaldera tersebut dan tercatat mengalami erupsi berulang sejak 1927.

Memori bencana kembali menguat pada 22 Desember 2018 ketika erupsi Anak Krakatau disertai longsoran tubuh gunung ke laut memicu tsunami Selat Sunda. Katalog tsunami BNPB mencatat 431 korban meninggal, 7.200 orang luka-luka, 15 orang hilang, dan 46.646 orang mengungsi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik Anak Krakatau memiliki dimensi risiko yang perlu dipantau secara ketat.

Kemenkes meminta masyarakat tidak panik dan mengikuti informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan BPBD. “Yang paling penting adalah masyarakat tidak panik, tetapi mengikuti informasi resmi, mengurangi paparan abu, dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan,” kata Aji. Kemenkes juga menerbitkan Surat Edaran Nomor KL.01.02/A/17765/2026 mengenai kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap dampak erupsi serta sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.(Andina)

PT FAREN GRAFIKA Harian Pagi Baubau Post KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Yaqut Soroti Penyebutan NU dalam Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji



Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencecar saksi dalam sidang kasus korupsi kuota haji, mempertanyakan penyebutan NU sebagai Nahdlatul Ulama.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Penyebutan nama Nahdlatul Ulama (NU) dalam catatan plotting kuota haji khusus memicu perdebatan dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Menteri Agama periode 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas, meminta saksi menjelaskan dasar penyebutan 'NU' sebagai Nahdlatul Ulama dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pertanyaan tersebut dilontarkan Yaqut kepada mantan honorer Kementerian Agama, Ridwan Kurniawan, dalam persidangan yang berlangsung Selasa (8/9) hingga Rabu (9/9) dini hari. Yaqut menilai penjelasan mengenai singkatan NU penting karena dalam catatan yang dipersiapkan disebutkan adanya alokasi 900 kuota haji.

"Ini bukan soal nama baik saya, tetapi soal nama baik organisasi. Saya tanya karena di BAP saudara Ridwan, NU itu ditulis sebagai Nahdlatul Ulama," kata Yaqut dalam persidangan.

Ridwan menjelaskan bahwa dirinya tidak membuat sendiri catatan tersebut. Ia mengaku hanya mengetik berdasarkan arahan Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus periode 2014-2020. Saat mengetik istilah NU, Ridwan mengaku sempat meminta penjelasan mengenai maksud singkatan tersebut.

Keterangan Ridwan kemudian dikonfirmasi Yaqut kepada Muhyi yang juga dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa KPK. Menurut Ridwan, ketika ia bertanya apakah NU yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama, Muhyi membenarkannya dan meminta istilah tersebut tetap ditulis. "Ya NU, NU Nahdlatul... NU. Berarti Nahdlatul Ulama? Ya sudah tulis saja NU," ujar Ridwan mengulang percakapan tersebut.

Perdebatan itu kemudian diambil alih Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani. Hakim meminta Ridwan memastikan apakah istilah NU dalam BAP memang merujuk pada Nahdlatul Ulama atau memiliki arti lain. Ridwan tetap menyatakan pemahamannya berasal dari percakapan dengan Muhyi ketika proses pengetikan berlangsung.

Yaqut juga mempertanyakan mengapa istilah tersebut secara spesifik diterjemahkan menjadi Nahdlatul Ulama dalam BAP, sementara dalam percakapan awal yang ia konfirmasi kepada Muhyi hanya disebut "NU". Hakim selanjutnya meminta Yaqut mengklarifikasi persoalan tersebut kepada Agus Syafii^{TMJ} yang disebut berkaitan dengan plotting kuota haji khusus.

Persoalan itu menjadi penting dalam perkara karena kuota tambahan haji 2024 merupakan bagian dari kebijakan

yang menambah kuota Indonesia sebanyak 20.000 jemaah. Kuota tersebut membuat jumlah jemaah Indonesia pada 2024 mencapai 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Secara historis, Indonesia pernah menerima tambahan kuota 10.000 jemaah pada 2019 dan 8.000 jemaah pada 2023. Pada 2024, tambahan mencapai 20.000 jemaah dan dibagi masing-masing 10.000 untuk haji reguler serta 10.000 untuk haji khusus. Kementerian Agama mencatat kuota 241.000 pada 2024 sebagai yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia saat itu.

Perkara yang kini disidangkan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan. Selain diduga memperkaya sejumlah pihak, perkara itu juga dikaitkan dengan 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Empat orang didakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.(*)

KPK Kembali Periksa Eks Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi, Dalam Kerugian Negara Kasus Iklan BJB



Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi diperiksa KPK

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), Yuddy Renaldi, Rabu (9/9/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan iklan sekaligus menghitung kerugian keuangan negara.

Yuddy tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun anggaran 2021-2023.

"Yang bersangkutan tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.15 WIB, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (9/9).

Pemeriksaan lanjutan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena KPK sedang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam pemeriksaan sebelumnya, KPK juga mendalami mekanisme pengadaan media placement dan dugaan adanya dana nonbujeter yang disisihkan dari pengadaan iklan.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan iklan Bank BJB pada periode 2021-2023. Berdasarkan perkembangan penyidikan KPK, perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp223 miliar.

Yuddy sebelumnya telah diperiksa pada Kamis (13/8/2026). Namun, pemeriksaan tidak sampai selesai karena kondisi kesehatannya menurun. Kuasa hukum Yuddy, Arief Sullaeman, ketika itu menyebut pemeriksaan sempat terhenti setelah kliennya hampir terjatuh.

"Pada prinsipnya hari ini melihat kondisi kesehatan beliau, penyidik melihat tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan," ujar Arief saat itu. KPK juga menjelaskan bahwa kondisi kesehatan menjadi pertimbangan penyidik sehingga Yuddy belum ditahan, sementara empat tersangka lain telah lebih dahulu ditahan.

Keempat tersangka yang ditahan KPK sejak 10 Agustus 2026 ialah Widi Hartoto, Ikin

Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma. Widi merupakan Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus mantan Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB periode 2020-2024, sedangkan Ikin merupakan Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Antedja Muliatama.

Suhendrik diketahui menjabat Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, sedangkan Elang Sophan Jaya Kusuma merupakan Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama. Keempatnya ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung 10-29 Agustus 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Secara historis, Bank BJB merupakan bank pembangunan daerah yang telah beroperasi sejak 20 Mei 1961. Bank tersebut berawal dari nasionalisasi perusahaan Belanda N.V. Denis dan kemudian berkembang menjadi Bank Jabar Banten sebelum menggunakan nama bank bjb pada 2010. Bank BJB juga tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Juli 2010 dengan kode saham BJBR.

Kasus ini juga berada dalam konteks panjang pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu institusi utama penindakan korupsi sejak awal 2000-an. Dalam perspektif global, pengawasan terhadap praktik korupsi dalam transaksi bisnis dan pengadaan juga menguat sejak dekade 1990-an, antara lain melalui Konvensi Antisuap OECD 1997. Karena itu, perkara yang menyangkut pengadaan barang dan jasa menjadi perhatian penting dalam agenda tata kelola perusahaan dan pencegahan korupsi.

Pemeriksaan Yuddy pada 9 September 2026 kini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk memperjelas mekanisme pengadaan iklan, aliran dana, peran masing-masing pihak, serta besaran kerugian keuangan negara. KPK masih memiliki kewenangan untuk mengembangkan perkara berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan.(*)

MIN 1 Baubau Tanamkan Keteladanan Rasulullah Lewat 500 Kali Salawat

“Ini sudah yang kelima kalinya kita melaksanakan Maulid Nabi. Terima kasih kepada orang tua dan wali murid yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini,” kata Yuliana.

Sebelum rangkaian acara utama berlangsung, para siswa terlebih dahulu melantunkan salawat Nabi. Madrasah semula menargetkan 1.000 kali lantunan, tetapi siswa berhasil menyelesaikan 500 kali. Dengan jumlah peserta sekitar 1.000 siswa, capaian tersebut jika dikalkulasikan mencapai sekitar 500 ribu lantunan salawat secara keseluruhan.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Baubau H. Hasim Umar, S.Pd.I., yang hadir dalam kegiatan itu, menilai peringatan Maulid Nabi penting untuk menghubungkan kecintaan kepada Rasulullah dengan pembentukan karakter peserta didik. Menurut dia, keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari.

“Maulid Nabi merupakan momentum untuk meneladani dan mengikuti sifat serta keimanan Ra-

sulullah kepada Allah SWT. Ini juga penting dalam memperkuat karakter peserta didik,” ujarnya.

Selain Hasim, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kementerian Haji Buton Selatan Hj. Nurhayati, SE., Kepala Tata Usaha Kemenag Baubau, Kepala Seksi Bidang Madrasah Marwiyah, S.Pd.I., pengawas lingkup Kota Baubau, kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN), serta Kepala Urusan Agama Kecamatan Murhum. Rangkaian kegiatan diisi pembacaan ayat suci Al-Qur’an, zikir, dan salawat yang diikuti siswa serta keluarga besar MIN 1 Baubau.

Dalam konteks sejarah Islam, peringatan Maulid Nabi berkembang jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kementerian Agama mencatat terdapat sejumlah versi mengenai awal tradisi tersebut, termasuk yang mengaitkannya dengan Dinasti Fathimiyah di Mesir maupun peringatan yang berkembang pada masa Sultan Muzhaffaruddin Al-Kaukabri di wilayah Irbil pada awal abad ke-7 Hijriah.

Di Nusantara, tradisi Maulid kemudian berkembang dalam beragam bentuk dan melahirkan karya keagamaan seperti Maulid Barzanji. NU Online mencatat teks karya Syekh Ja’far al-Barzanji menjadi salah satu bacaan Maulid yang populer di dunia Islam dan turut berkembang luas di Nusantara. Di MIN 1 Baubau, nilai historis dan keagamaan itu diterjemahkan melalui pembiasaan salawat serta keteladanan akhlak. “Tujuan kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW agar peserta didik kelak dapat meneladani sifat Rasulullah yang santun, rajin belajar dan memiliki semangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Yuliana.

Setelah zikir dan salawat bersama, kegiatan ditutup dengan makan bersama. Para peserta menikmati beragam makanan khas lokal yang disiapkan keluarga besar MIN 1 Baubau sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan madrasah. (*)

CX126 Jadi Strategi BPJS Kesehatan Meratakan Standar Pelayanan JKN Nasional

dalam pengembangan layanan, baik melalui kantor cabang maupun kanal digital.

“Di era keterbukaan informasi, customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik,” kata Pujo, Jumat (4/9/2026).

CX126 menggunakan penilaian komprehensif melalui delapan pilar, yakni Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture. Penilaian juga memasukkan Voice of Customer agar pengalaman peserta ikut menentukan gambaran kualitas pelayanan.

Menurut Pujo, program tersebut tidak sekadar mencari kantor cabang dengan kinerja terbaik. CX126 dirancang untuk menemukan faktor yang membuat sebuah kantor cabang unggul sehingga praktik yang telah terbukti efektif dapat direplikasi di kantor lainnya. Prinsip pelayanan yang menjadi sasaran ialah Mudah, Cepat, Setara, dan Solutif.

“Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” ujarnya.

Upaya itu melanjutkan perjalanan panjang sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 setelah transformasi PT Askes (Persero), sebagaimana diatur UU Nomor 24 Tahun 2011. Dalam penyeleng-

garan JKN, standar mutu pelayanan, kepuasan peserta, kebutuhan peserta, serta kesinambungan program telah menjadi bagian penting tata kelola.

Secara global, penguatan mutu layanan sejalan dengan agenda Universal Health Coverage (UHC). WHO mencatat seluruh negara anggota berkomitmen menuju cakupan kesehatan semesta pada 2005, sementara pencapaian universal health coverage oleh PBB pada 2012 memperkuat agenda kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan bermutu tanpa kesulitan finansial.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan hasil asesmen CX126 harus menghasilkan perbaikan nyata, bukan berhenti pada penghargaan. Kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses, dan kepastian solusi dinilai menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan peserta. “Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap peserta JKN, di mana pun berada, merasakan layanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan dapat diandalkan,” katanya.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan kualitas pelayanan tidak ditentukan oleh besar kecilnya kantor cabang, lokasi, ataupun tingkat tantangan yang dihadapi. Kepemimpinan, proses kerja, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya pelayanan harus bergerak dalam satu arah agar CX126 bukan hanya memetakan kualitas 126 kantor cabang, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang konsisten di seluruh BPJS Kesehatan. (**)

APBD Perubahan Baubau 2026 Disepakati Antar Banggar DPRD dan Pemkot, Pajak Daerah Ditarget Rp52,479 Miliar

pajak pada sektor kuliner, restoran, hotel dan penginapan, serta jasa parkir. “Optimalisasi PAD membutuhkan keterlibatan seluruh OPD,” katanya.

Banggar juga meminta Pemkot Baubau segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait target pendapatan yang bersumber dari dana transfer. Langkah itu dinilai penting karena perubahan target pendapatan akan berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah dan penyesuaian belanja dalam Perubahan APBD 2026. Setelah pembahasan, Banggar dan TAPD menyepakati sejumlah penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sisi belanja, Banggar meminta penjelasan mengenai sumber tambahan anggaran dibandingkan APBD induk 2026. Pemkot menjelaskan penambahan belanja berasal dari peningkatan pendapatan daerah dan kenaikan pembiayaan netto. Atas penjelasan tersebut, Banggar meminta rasionalisasi belanja dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan revisi target PAD serta optimalisasi sisa anggaran berdasarkan hasil perhitungan dan rekonsiliasi keuangan tahun sebelumnya.

Perhatian Banggar juga diarahkan pada belanja pegawai setelah adanya kebijakan penguatan atau penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU), belanja barang dan jasa, belanja operasional, transfer antarpemerintah daerah, hingga jasa tenaga ahli. Pembahasan belanja modal, termasuk belanja tanah, turut berlangsung dinamis. “Setiap penganggaran harus mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, termasuk standar harga satuan regional,” ujar Abdul Tamim.

Selain persoalan fiskal, Banggar meminta pemerintah mengoreksi sejumlah target pembangunan

2026 agar kebijakan anggaran lebih selaras dengan indikator makro daerah. Sasaran yang menjadi perhatian meliputi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Abdul Tamim menyebut pembahasan bersama TAPD berlangsung dinamis, konstruktif, dan argumentatif karena menyangkut arah kebijakan ekonomi serta prioritas pembangunan daerah.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2026 dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Dokumen ditandatangani Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim selaku pihak pertama bersama pimpinan DPRD Kota Baubau selaku pihak kedua di Ruang Rapat DPRD Kota Baubau. Sekretaris DPRD Kota Baubau Yahya Wirayahman, S.STP., M.KP., turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Secara historis, mekanisme KUA-PPAS merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang diperkuat dalam era reformasi fiskal Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2003 menjadi salah satu tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara, sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD untuk dibahas bersama DPRD.

Dengan kesepakatan itu, perubahan KUA dan PPAS menjadi pedoman bagi Pemkot Baubau untuk menyusun rancangan Perubahan APBD 2026 sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut sekaligus menempatkan optimalisasi PAD dan pengendalian belanja sebagai dua sisi penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan. (*)

DPRD dan Pemkab Busel Bahas APBD Perubahan 2026 dengan Belanja Rp576,9 Miliar

ini diperlukan agar alokasi anggaran tetap terarah, efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata La Ode Harwanto.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah dirinci sebesar Rp533.433.056.273, sedangkan belanja daerah mencapai Rp576.948.875.483,35. Pemerintah daerah juga memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp43.515.819.210,35, sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan nihil.

Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja yang ditutup melalui penerimaan

pembiayaan. La Ode Harwanto berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan kesepakatan sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan tidak terkendala perubahan struktur anggaran.

“Pemerintah daerah berharap pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 dapat segera mencapai kesepakatan bersama antara Pemkab Busel dan DPRD,” ujarnya.

Secara historis, perubahan APBD merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang memiliki dasar kuat dalam reformasi keuangan negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya ditetapkan melalui

Hingga ke Desa

didaya lokal,” kata Bupati.

Kebutuhan energi, lanjut dia, semakin penting ketika hasil perikanan dan rumput laut diarahkan menuju proses hilirisasi. Fasilitas pendingin dan pengolahan pascapanen membutuhkan pasokan listrik yang stabil agar produk masyarakat dapat ditangani dengan lebih baik dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Karena itu, pembangunan kelistrikan di Buton Tengah diharapkan tidak berhenti pada perluasan jaringan, tetapi terhubung dengan agenda penguatan ekonomi produktif.

Dalam konteks nasional, pemerataan listrik memang menjadi agenda pembangunan yang berlangsung panjang. Sejarah kelistrikan Indonesia memasuki tonggak penting pada 27 Oktober 1945 ketika Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan kapasitas pembangkit saat itu 157,5 megawatt. Tujuh dekade kemudian, rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai sekitar 87 persen pada akhir 2015, naik dari 67 persen pada 2010.

Persoalan pemerataan energi juga bukan hanya tantangan Indonesia. Data Bank Dunia menunjukkan akses listrik global telah mencapai sekitar 92 persen pada 2023, tetapi masih terdapat sekitar 666 juta orang yang belum memperoleh akses listrik. Penduduk yang belum terlayani umumnya banyak

peraturan daerah. Regulasi tersebut juga menempatkan anggaran sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam praktik internasional, anggaran pemerintah daerah juga berkembang dari sekadar instrumen pengendalian keuangan menjadi alat untuk mengukur kinerja, mengarahkan penggunaan sumber daya, memperkuat disiplin fiskal, dan meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. World Bank menempatkan penganggaran daerah sebagai instrumen penting untuk memastikan sumber daya publik dialokasikan secara efisien dan sesuai prioritas pembangunan. (*)

berada di wilayah terpencil dan kawasan dengan tantangan geografis maupun ekonomi, sehingga perluasan jaringan dan solusi energi terdesentralisasi tetap menjadi agenda global.

Selain memperluas akses, Bupati meminta proyek kelistrikan di Buton Tengah memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal. “Keterlibatan tenaga kerja lokal perlu menjadi perhatian dalam proyek kelistrikan di Buton Tengah,” ujarnya. Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja sekaligus memberikan efek ekonomi langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Pemkab Buton Tengah dan PLN UID Sulselrabar pun sepakat mengawal percepatan pemerataan listrik hingga pelosok desa. “Keandalan pasokan listrik harus berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi daerah,” kata Bupati. Pertemuan itu turut dihadiri kepala OPD terkait, Camat Talaga Raya, Camat Sangia Wambulu, tokoh adat, serta jajaran manajemen PLN UID Sulselrabar. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Buton Tengah yang bertumpu pada potensi kelautan, perikanan, dan komoditas pesisir. (*)

Damkar Baubau Respons Empat Kejadian Darurat di Tengah Cuaca Ekstrem, Dua Kebakaran Lahan dan Truk Terbalik, Tiga Orang Luka Serius



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Tim gabungan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menangani empat kejadian kedaruratan dalam dua hari, 5-6 September 2026. Insiden tersebut meliputi dua kebakaran lahan, kecelakaan truk yang menyebabkan tiga orang luka serius, serta evakuasi ular sanca dari kawasan permukiman.

Tiga korban luka serius tercatat dalam kecelakaan truk di Kelurahan Lowu-Lowu. Truk bermuatan kaca dan besi itu kehilangan keseimbangan ketika bergerak mundur sehingga muatan menimpa tiga kru. Petugas segera melakukan evakuasi dan membawa korban untuk mendapatkan penanganan medis.

Pada saat yang hampir bersamaan, petugas pemadam kebakaran juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran lahan. Kondisi ini berkaitan dengan cuaca ekstrem dan kekeringan yang

meningkatkan risiko munculnya titik api di sejumlah wilayah Baubau.

Kebakaran pertama terjadi di Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI). Warga melaporkan kepulan asap tebal dari lahan berukuran sekitar 25 x 30 meter di dekat SMA Negeri 7. Sebanyak lima personel Sektor BWI bersama armada pemadam dikerahkan untuk menangani kejadian tersebut.

Kebakaran lahan lainnya terjadi di Kelurahan Lipu. Api membakar rumput kering seluas sekitar 40 meter persegi di samping Daihatsu Lipu. Peristiwa itu diduga berkaitan dengan pembakaran sampah oleh warga. Empat personel Mako Damkar dan satu armada pemadam diterjunkan ke lokasi.

Selain kebakaran dan kecelakaan, petugas menerima laporan keberadaan ular sanca sepanjang lebih dari satu meter yang masuk ke kawasan Perumahan Amalia, Kelurahan Sulaa. Ular tersebut berhasil diamankan

petugas sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi penghuni perumahan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau H. La Ode Ali Hasan, SE, M.Si., mengatakan penanganan empat kejadian itu dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Pos Bersama Karhutla menjadi salah satu titik koordinasi antara Damkar, kepolisian, dan relawan dalam mempercepat informasi serta respons di lapangan.

“Kolaborasi lintas sektor di Pos Bersama Karhutla ini mempercepat arus informasi dan eksekusi di lapangan,” kata Ali Hasan dalam siaran persnya, Minggu (6/9/2026).

Menurut Ali Hasan, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material signifikan akibat dua kebakaran lahan tersebut. Sementara itu, tiga korban pada kecelakaan truk mengalami luka serius dan telah mendapatkan penanganan medis.

Kekeringan dan kebakaran lahan bukan

hanya menjadi persoalan lokal. Secara nasional, Indonesia berulang kali menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan ketika musim kering berkepanjangan, terutama saat fenomena El Nino memperkuat kondisi panas dan minim hujan. Pengalaman Indonesia menghadapi kebakaran besar pada 1997-1998 dan 2015 menunjukkan bahwa pencegahan di tingkat masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan dampak bencana. Di tingkat global, kebakaran vegetasi juga menjadi ancaman berulang di berbagai kawasan yang mengalami musim kering ekstrem.

Karena itu, Damkar Baubau mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membakar sampah maupun membuka lahan. “Kami mengimbau warga tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan api,” ujar Ali. Petugas juga akan mengencarkan sosialisasi dan mendalami penyebab setiap kejadian untuk mencegah insiden serupa. (*)

Pemkot Baubau Petakan Anak Jalanan, Fokus Putus Mata Rantai Eksploitasi



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menyiapkan pola penanganan anak jalanan yang tidak berhenti pada penertiban, tetapi diarahkan hingga pemulihan keluarga, keberlanjutan pendidikan, dan perlindungan anak. Pemetaan lokasi serta kondisi anak menjadi langkah awal untuk mencegah mereka kembali meminta-minta di ruang publik.

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Anak Jalanan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Baubau di Kantor DP3AKB, Kamis (3/9/2026). Rapat yang dimulai pukul 11.00 WITA tersebut dipimpin Kepala DP3AKB Kota Baubau Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., dan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta unsur terkait.

Abdul Rahman mengatakan persoalan anak jalanan tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum. Menurut dia, aktivitas anak di jalan dapat berkelindan dengan persoalan ekonomi keluarga, pola pengasuhan, pendidikan, hingga aspek perlindungan anak. “Kita perlu melihat persoalan ini secara utuh. Penanganannya harus dilakukan bersama-sama dan dengan pendekatan yang humanis,” kata Abdul Rahman.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Kesra, Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, UPTD PPA, serta pekerja sosial. Pembagian peran antarlembaga menjadi penting karena penanganan mencakup asesmen, pendataan, pemetaan wilayah, pemulangan anak kepada keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemkot Baubau mencatat sebagian anak yang beraktivitas di jalan telah berulang kali mendapatkan teguran dan pendekatan persuasif. Sejumlah anak juga sudah terdenda dan memperoleh bantuan sosial. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya menghentikan aktivitas mereka di perempatan, persimpangan, pasar, dan fasilitas publik karena meminta-minta dianggap relatif mudah menghasilkan uang.

Karena itu, pemerintah akan memetakan titik-titik aktivitas anak jalanan sekaligus menggali kondisi masing-masing anak. Aspek yang akan dilihat meliputi latar belakang anak, kondisi keluarga, pendidikan, pengasuhan, kemampuan ekonomi, dan lingkungan sosial. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar menentukan inter-

vensi jangka pendek maupun jangka panjang.

Pola penanganan kemudian diarahkan melalui pencegahan, patroli secara humanis dan persuasif, asesmen, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi anak ke keluarga dan lingkungan masyarakat. Koordinasi di tingkat kelurahan juga akan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat. Terhadap pihak yang terbukti mengeksploitasi anak, pemerintah mendorong langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan semacam itu sejalan dengan perkembangan kebijakan perlindungan anak secara global. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989, yang mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi tersebut menempatkan anak sebagai pemegang hak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari eksploitasi.

Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kerangka perlindungan itu diperkuat antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU tersebut menegaskan kewajiban perlindungan anak dari perlakuan tidak manusiawi serta mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial.

Dalam konteks anak yang berada di jalan, Komite Hak Anak PBB pada 2017 menekankan perlunya strategi jangka panjang yang holistik, dengan mengatasi akar persoalan, menjaga martabat anak, memperkuat dukungan keluarga, serta menghindari pendekatan represif yang semata-mata memindahkan anak dari ruang publik. Prinsip itu sejalan dengan arah Pemkot Baubau. “Penanganan anak jalanan bukan sekadar memindahkan anak dari jalan, tetapi bagaimana memutus mata rantai yang menyebabkan mereka kembali ke jalan,” ujar Abdul Rahman.

Pemkot Baubau juga mengimbau masyarakat tidak membiasakan memberikan uang secara langsung kepada anak yang meminta-minta di jalan. Abdul Rahman menilai dukungan masyarakat perlu diarahkan pada pola yang tidak membuat aktivitas tersebut terus berulang. “Anak-anak semestinya tidak menjadikan jalan sebagai tempat mencari masa depan. Jalan adalah tempat yang harus mereka lewati, bukan tempat mereka menggantungkan kehidupan,” katanya. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah berharap anak dapat kembali kepada keluarga, pendidikan, dan lingkungan yang aman serta memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara layak. (*)